

2021



RENJA

RENCANA KERJA



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan Jenderal Sudirman No. 02 RT. 04 – Tenggarong 75512



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2021 mengacu kepada Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu di susun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud Undang-undang disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang di laksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bserencana.

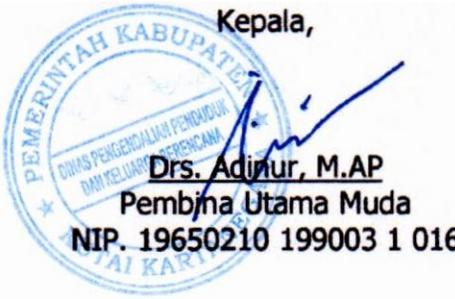
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 disusun untuk jangka waktu 1 tahun. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2005 – 2025.

Lebih lanjut isi dari RENJA ini adalah gambaran perencanaan berbagai rencana pembangunan yang menjadi bagian dari tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai program dan kegiatan serta memperhatikan berbagai kondisi dan potensi lokal yang akan menjadi bagian dalam proses pembangunan di masa-masa yang akan datang.

Demikian RENJA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 disusun untuk dapat dipedomani bagi seluruh jajaran pejabat beserta staf di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewujudkan pembangunan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tenggarong, 18 Maret 2020

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kutai Kartanegara

Kepala,

Drs. Adinur, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650210 199003 1 016

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	2
I.3. Maksud dan Tujuan	3
I.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II	
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU (2017)	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	19
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Renstra-PD pada tahun 2019	21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	26
BAB III	
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	46
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	46
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA-PD	46
BAB IV	
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	48
4.1. Program dan Kegiatan	39
BAB V	
PENUTUP	57

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, didasari atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini secara substansi mengamatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja-PD mengacu pada kerangka kebijakan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah secara sistematis terarah terpadu menyeluruh dan tanggapan terhadap perubahan yang berjangka panjang, menengah dan jangka pendek sebagaimana di amanatkan dalam UU nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi rencana Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 menjabarkan visi dan misi serta arah pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra).

Renja OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga melaksanakan amanah Undang-Undang 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.

Penyusunan Renja OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis dan implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 di mana Renja merupakan dokumen perencanaan OPD untuk 1 (satu) tahun serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam Rencana Kerja memuat visi misi tujuan kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan yang bersifat indikatif didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah dan berorientasi pada hasil yang akan di capai selama kurun waktu 1 tahun .

Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah, DPRD, kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, politik dan keamanan. Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

Dalam dokumen Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2010 tentang RPJM Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 diamanatkan tujuh misi pembangunan Kutai Kartanegara, yang mana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan pada Misi 1 yaitu : “Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik“ dan pada Misi 2 : Meningkatnya sumber daya manusia yang berkompeten.

Dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD Tahun 2010-2015 Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat beberapa persoalan – persoalan pembangunan yang telah dirumuskan dan harus segera diatasi yaitu *Belum optimalnya Pengendalian Penduduk dan Pelayanan Keluarga Berencana dengan indikator Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio KB Aktiv*, yang mana kebijakan pembangunan daerah ini merupakan tujuan dan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam *misi Ke 1 dan 2 dari RPJMD* pembangunan tersebut.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kutai Kartanegara tahun 2021 memperhatikan kepada peraturan Perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Renja dan arah garis kebijakan terkait yang di rumuskan antara lain :

- 1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
- 2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang –undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
- 5) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang - undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 12) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 13) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 15) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 16) Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari dibuatnya Rencana kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Kutai Kartanegara Periode 2016-2021. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2021.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi misi Pemerintah Daerah.
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran Aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu terarah dan terukur.
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 1 tahun.
4. Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA – PD TAHUN LALU
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun lalu dan Capaian Renstra-PD
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Renstra PD pada tahun 2021
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja-PD
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
	4.1. Program dan Kegiatan
BAB V	PENUTUP

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD

Pencapaian keberhasilan kinerja program / kegiatan pada tahun 2019 secara keseluruhan capaian fisik rata-rata **84,30%** dan realisasi keuangan rata-rata **80,07%**.

Penjelasan Analisis Kinerja

Adapun analisis pencapaian kinerja output (fisik) sebagai berikut :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan indicator capaian pelayanan administrasi perkantoran mencapai 93%.
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan indicator cakupan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik mencapai mencapai 80,55%.
3. **Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur** dengan indicator rata-rata nilai SKP ASN 86,56 atau tercapai 101,84%.
4. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** dengan indicator persentase konsistensi RENSTRA dan RENJA sebesar 100%, ketepatan waktu pelaporan keuangan dan asset sebesar 100% dan persentase tindak lanjut temuan audit sebesar 100%.
5. **Program Keluarga Berencana** dengan indicator angka pemakaian kontrasepsi CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 tahun sebesar 76,40% tercapai sekitar 102,69% dari target sebesar 74,40% dan cakupan pelayanan KB baru sebesar 16,09% tercapai sekitar 105,51% dari target sebesar 15,25%.
6. **Program Pengendalian Penduduk** dengan indicator Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 2,30% atau tercapai sekitar 97,39% dari target sebesar 2,24% dan Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah mencapai 98,65% dari target sebesar 100%.
7. **Program Advokasi, Pergerakan dan Informasi** dengan indicator jumlah kegiatan advokasi, pergerakan dan informasi sebanyak 2 kegiatan dari target sebanyak 3 kegiatan atau tercapai sekitar 66,67% dan persentase Kampung KB bernilai baik sekitar 7,89% dengan capaian sebesar 15,78% dari target sebesar 50%.
8. **Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga** dengan indicator cakupan PUS peserta KB Anggota UPPKS yang ber-KB Mandiri dari target sebesar 40,45% tercapai 54,65% atau sekitar 135,10%. Selanjutnya adalah cakupan keluarga anggota BKB yang ber-KB dengan target sebesar 86,18% dan tercapai sekitar 54,02% atau sekitar 62,68%. Untuk indicator cakupan keluarga anggota BKR yang ber-KB dari target sebesar 92,09% tercapai 26,06% atau sekitar 28,30% serta cakupan keluarga anggota BKL yang ber-KB dari target sebesar 86,18% tercapai 42,89% atau sekitar 49,77%.

Sumber; Monev 2019

Penjelasan Analisis Keuangan

Pencapaian keberhasilan kinerja keuangan program/kegiatan pada tahun 2019 secara keseluruhan target keuangan untuk Belanja Langsung yang **dikelola** sebesar **Rp. 12.491.857.053,00** direalisasikan sebesar **Rp. 9.816.687.736,00**

Adapun analisis pencapaian realisasi keuangan sebagai berikut:

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan target anggaran sebesar **Rp. 2.126.784.053,00** terealisasi sebesar **Rp. 1.950.311.080,00** atau tercapai sekitar **91,70%**.
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan target anggaran sebesar **Rp. 1.330.000.000,00** terealisasi sebesar **Rp. 832.410.100,00** atau tercapai sekitar **62,59%**.
3. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** dengan target anggaran sebesar **Rp. 200.000.000,00** terealisasi sebesar **Rp. 191.739.100,00** atau sekitar **95,87%**.
4. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** dengan target anggaran sebesar **Rp. 194.000.000,00** terealisasi sebesar **Rp. 180.383.850,00** atau sekitar **92,98%**.
5. **Program Keluarga Berencana** dengan target anggaran sebesar **Rp. 850.000.000,00** terrealisasi sebesar **Rp. 750.327.000,00** atau sekitar **88,27%**.
6. **Program Pengendalian Penduduk** dengan target anggaran sebesar **Rp. 6.729.563.000,00** terealisasi sebesar **Rp. 5.297.335.091,00** atau sekitar **78,72%**.
7. **Program Advokasi, pergerakan dan Informasi** dengan target anggaran sebesar **Rp. 365.000.000,00** terealisasi sebesar **Rp. 157.676.060,00** atau sekitar **43,20%**.
8. **Program Ketahanan dan pemberdayaan keluarga** dengan target anggaran sebesar **Rp. 696.510.000,00** terealisasi sebesar **Rp. 456.505.455,00** atau sekitar **65,54%**.

Sumber; Monev 2019

Dapat dilihat dari tabel Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Renstra-OPD s/d Tahun 2019.

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan
Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama OPD : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan / Bidang / Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA PD) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan RENJA PD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d Tahun Berjalan 2020		Ket
					Target RENJA PD Tahun 2019	Realisasi RENJA PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar										
	Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
	Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	95	100	93	93.00	100	96	95.98	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	240	48	48	48	100.00	48	144	60.00	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	750	302	151	108	71.52	113	523	69.73	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan	81	30	30	30	100.00	0	60	74.07	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah unit peralatan kerja diperbaiki /dipelihara	317	110	55	55	100.00	109	274	86.44	
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	190	50	50	50	100.00	41	141	74.21	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor	150	30	33	33	100.00	30	93	62.00	
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minumam	4,600	1,180	1000	920	92.00	1200	3,300	71.74	

			Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah jasa administrasi Teknis Perkantoran	290	116	58	58	100.00	61	235	81.03	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	195,000	6	39000	39000	100.00	75000	114,006	58.46	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi	725	222	122	105	86.07	210	537	74.07	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Jumlah Peraturan Perundang-Undangan	13,136	1,440	7716	7716	100.00	2220	11,376	86.60	
			Penataan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah jenis arsip	3	-	1	1	100.00	1	2	66.67	
			Fasilitasi memperingati hari-hari besar tertentu (pameran)	Jumlah kegiatan hari besar/nasional dan pameran	11	-	3	3	100.00	5	8	72.73	
			Fasilitasi Tempat Kerja / Sewa Gedung / Rumah	Jumlah lama sewa	1	-	-	-	#DIV/0!	0	-	-	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	100	75.00	85	80.55	94.76	100	85	85.18	
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	85	15	37	37	100.00	29	81	95.29	
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	79	29	19	19	100.00	23	71	89.87	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	5	2	1	1	100.00	0	3	60.00	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional kantor yang dipelihara	753	251	151	129	85.43	158	538	71.45	
			Pengadaan Meubelair Gedung Kantor Dinas PPKB	Jumlah meubelair	2	1	-	-	-	0	1	50.00	
			Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah unit gedung yang direhab	600	300	-	-	-	0	300	50.00	
			Pembangunan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah bangunan	1	-	1	1	100.00	1	1	100.00	
			Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah kendaraan	2	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan	1	-	-	-	-	-	-	-	
			Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	1	1	1	2	200.00	-	3	3.00	
			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	145	-	-	-	-	-	-	-	

			Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	145	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pengadaan pakaian olah raga	Jumlah pakaian olah raga	145	-	-	-	-	-	-	-	-
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	89	83	87	86.56	99.49	87	86	96.09	
			Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah DPPKB	Jumlah anggota tim	47	15	15	15	100.00	15	45	95.74	
			Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia ASN Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	25	-	-	-	-	7	7	28.00	
			Rapat Koordinasi Perangkat Daerah	Jumlah peserta	320	50	200	200	100.00	150	400	125.00	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) 100 2) 100 3) 100	90	90	100	111.11	100	97		
			Penyusunan Dokumen Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Kinerja dan Keuangan	337	-	6	6	100.00	80	86	25.52	
			Penyusunan Revisi Dokumen Renstra	Tersedianya dokumen Renstra	1	-	-	-	-	1	1	100.00	
			Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat	2	-	-	-	-	1	1	50.00	
			Penyediaan Sertifikat Tanah	Jumlah sertifikat	5	-	-	-	-	-	-	-	
			Penyusunan Buku Profil DPPKB	Tersedianya Buku Profil DPPKB	100	-	-	-	-	-	-	-	
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen	3	1	1	1	100.00	1	3	100.00	
			Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan	84	4	-	-	-	42	46	54.76	
			Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan BMD	2	-	-	-	-	1	1	50.00	
			Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga	Jumlah dokumen	1	1	-	-	-	-	1	100.00	
			Program Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	78.00	73.29	74.40	76.40	102.69	74.90	74.90	96.03	

			Alokasi Bantuan Operasional KB tahun 2017 (DAK)	Terpenuhinya operasional Balai Penyuluhan KB	12	12	-	-	-	-	-	-	Kegiatan Pindah Ke Program Pengendalian Penduduk
			Peningkatan sarana dan prasarana Keluarga Berencana (DAK-2017)	Terpenuhinya dukungan sarana penyuluhan KB	4	4	-	-	-	-	-	-	Kegiatan Pindah Ke Program Pengendalian Penduduk
			Pembinaan Petugas Pengelola Program KB di Fasilitas Kesehatan dan Jejaring	Jumlah Petugas Faskes yang dibina	110	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengadaan sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah ALOKON	17	-	8	8	100.00	7	15	88.24	
			Monitoring dan Evaluasi Distribusi ALOKON	Jumlah Kegiatan Monitoring	18	-	-	-	-	-	-	-	
			Fasilitas Tim KB Keliling (TKBK) Kecamatan ke Desa	Jumlah Akseptor yang dilayani	4,640	-	1040	1000	96.15	1440	2,440	52.59	
			Pelayanan KB	Jumlah PUS yang dilayani	1,840	-	703	703	100.00	522	1,225	66.58	
			Pelatihan CTU MKJP bagi tenaga Medis	Jumlah bidan yang dilatih	75	-	30	30	100.00	15	45	60.00	
			Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi	Cakupan PUS yang isterinya dibawah 20 tahun	54.87	56.58	56.00	56.00	100.00	55.44	55.44	101.04	
			Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR)	Jumlah kelompok remaja yang mendapatkan advokasi dan KIE	40.00	-	-	-	-	60	60	150.00	
			Perlindungan Kesehatan Reproduksi	Jumlah peserta layanan kesehatan reproduksi	200	-	-	-	-	-	-	-	
			Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	2.16	18		45	-	2.2	2	101.85	
			Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	Jumlah KK	27,626	-	7626	7626	100.00	20000	27,626	100.00	
			Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara	Dokumen Grand Design	1	-	-	-	-	-	-	-	
			Desiminasi Grand Design dan Pengendalian Kependudukan	Peserta desiminasi	100	4	-	-	-	-	4	4.00	

			Pengelolaan data dan informasi Program Pengendalian Penduduk dan KB tingkat kabupaten	Jumlah dokumen yang dikelola	1,728	-	1728	1728	100.00	-	1,728	100.00	
			Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan	Jumlah Forum	425	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengembangan kapasitas sumber daya manusia PKB/PLKB/Kader	Jumlah PKB/PLKB/Kader	3,500	-	890	890	100.00	1721	2,611	74.60	
			Pelatihan pencatatan dan pelaporan KB di faskes	Jumlah Peserta	190	37	60	60	100.00	-	97	51.05	
			Alokasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK)	Terpenuhinya operasional Kegiatan Keluarga Berencana	90	18	18	18	100.00	-	36	40.00	
			Peningkatan sarana dan prasarana Keluarga Berencana (DAK)	Terpenuhinya dukungan sarana penyuluhan KB	11	3	2	1	50.00	-	4	36.36	
			Penyusunan Dokumen Pendukung Alokasi DAK Fisik	Tersedianya dokumen pendukung sarana fisik KB	20	-	7	7	100.00	3	10	50.00	
			Program Advokasi, Pergerakan, dan Informasi	Jumlah Kegiatan Advokasi, Pergerakan dan Informasi	13	4	3	2	66.67	3	9	69.23	
				Persentase Kampung KB Bernilai Baik	100	5	50	5.41	10.81	80	11	10.81	
			Pendataan Keluarga	Jumlah Keluarga	31,626	8,966	-	-	-	-	8,966	28.35	Kegiatan Pindah Ke Program Pengendalian Penduduk
			Pelatihan peningkatan keterampilan MUPEN ON THE ROAD	Jumlah Peserta	10	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan Tidak Dilaksanakan Karena Provinsi Sudah Tidak Melaksanakan
			Fasilitasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Jumlah media dan sarana produksi KIE	11	-	-	-	-	3	3	27.27	
			Database Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah databasa Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1	-	-	-	-	1	1	100.00	
			Fasilitasi pengelolaan kampung KB	Jumlah Kampung KB	38	37	37	37	100.00	38	37	98.25	

				Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yg Ber-KB Mandiri	40.67	40.30	40.45	40.45	100.00	40.59	54.65	134.37	
					Cakupan Keluarga Anggota BKB yang ber-KB	90.18	85.18	87.15	87.15	100.00	87.4	87.40	96.92	
					Cakupan Keluarga Anggota BKR yang ber-KB	95.05	90.59	93.59	93.59	100.00	93.8	93.80	98.68	
					Cakupan Keluarga Anggota BKL yang ber-KB	90.18	85.18	87.15	87.15	100.00	87.4	87.40	96.92	
				Peningkatan Ketrampilan Kader dan Anggota Kelompok UPPKS	Jumlah Kader dan anggota UPPKS	185	20	40	40	100.00	75	135	72.97	
				Pengembangan Jaringan dan Media Promosi Produk Kelompok UPPKS	Jumlah UPPKS	36	-	-	-	-	-	-	-	
				Penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional Tingkat Provinsi	Kegiatan Hari Keluarga Nasional	1	-	-	-	-	1	1	100.00	
				Pengembangan Kelompok BKB	Jumlah Orang dalam Kelompok BKB	589	-	93	83	89.25	200	283	48.05	
				Pengembangan Kelompok BKL	Jumlah Orang dalam Kelompok BKL	200	-	93	83	89.25	100	183	91.50	
				Pengembangan kelompok BKR	Jumlah Orang dalam Kelompok BKR	345	-	30	30	100.00	150	180	52.17	
				Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Jumlah PPKS	18	-	-	-	-	1	1	5.56	
				Pengembangan ketahanan keluarga bagi generasi muda	Jumlah sarana kegiatan GenRe	21	-	2	2	100.00	-	2	9.52	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dasar pembentukan Dinas Penendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 68 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Menurut Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bahwa pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dilandaskan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Penduduk sebagai modal dasar dan factor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang idial antara kuantitas dan kuanlitas penduduk, dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan pengendalian angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, Pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional serta serta Peraturan Pemerintah nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Keluarga Berencana dan Sistem Informasi keluarga penyampaian sisitem informasi keluarga yang merupakan seperangkat tatanan yang meliputi data dan informasi indicator prosedur perangkat teknologi dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yg berguna dalam mendukung pembangunan keluarga. Pendataan Keluarga adalah tata cara pengumpulan pengolahan penyajian dan pemanfaatan data demografi data keluarga berencana, data keluarga sejahtera dan data anggota keluarga yg didata selama 5 tahun oleh pemerintah daerah dan masyarakat dengan menampilkan akurat, relevan valid dan dapat dipercaya, Pencatatan dan pelaporan program kependudukan dan keluarga berencana adalah tata cara pencatatan dan pelaporan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Data dan Informasi keluarga adalah data dan informasi hasil sisitem informasi keluarga yang mana seperangkat tatanan yang meliputi data dan informasi indicator prosedur perangkat teknologi dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yg berguna dalam mendukung pembangunan keluarga ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan program pendukung kegiatan.

Keluarga berencana Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan misi ke satu RPJMD meningkatkan penyelenggraan pemerintah dan kualitas pelayanan pablik dengan sasaran yg hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah optimalnya pengendalian penduduk dan pelayanan keluarga berencana di indicator Laju Pertumbuhan Penduduk.

Adapun kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan lampiran 1 huruf (n) undang-undang 23 tahun 2014 pembagian urusan Pemerintah bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

1. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
2. Pemetaan Perkiraan pengendalian penduduk cakupan wilayah kabupaten/kota.
3. Pelaksanaan Advokasi, komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan kb sesuai dengan kearifan budaya local.
4. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas lapangan KB (PLKB/PKB)

5. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan dan alat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan kb di kabupaten / kota
6. Pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan dan pembinaan kesertaan ber- KB.
7. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
8. Pelaksanaan dan peningkatan peran organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sesuai dengan tabel berikut :



Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	IKK	Target RENSTRA PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00	100.00	100.00	100.00	93.00	100.00	100.00	100.00	
2	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	90.00	92.00	95.00	98.00	80.00	85.00	90.00	98.00	
3	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	Nilai SKP	85.00	87.00	89.00	89.50	86.56	87.00	89.00	89.50	
4	Cakupan Pelayanan KB Baru	Persentase Peserta KB Baru	15.25	15.57	15.65	16.00	15.25	15.57	15.65	16.00	
5	Cakupan Kelompok Remaja Yang Mendapatkan Advokasi dan KIE	Persentase Kelompok Remaja Yang Mendapatkan Advokasi dan KIE	65.00	67.00	69.00	71.00	60.00	67.00	69.00	71.00	
6	Jumlah Kegiatan Advokasi, Pergerakan dan Informasi	Jumlah Kegiatan	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	
7	Kampung KB Baik	Persentase Kampung KB Bernilai Baik	5.41	80.00	100.00	100.00	50.00	80.00	100.00	100.00	
8	Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS Yang Ber-KB Mandiri	Persentase PUS Anggota UPPKS Yang Ber-KB Mandiri	40.50	40.59	40.67	41.20	40.45	40.59	40.67	41.20	
7	Cakupan Keluarga Anggota BKB Yang Ber-KB	Persentase Keluarga BKB Yang Ber-KB	87.15	87.40	90.18	95.20	87.15	87.40	90.18	92.50	
8	Cakupan Keluarga Anggota BKL Yang Ber-KB	Persentase Keluarga BKL Yang Ber-KB	87.15	87.40	90.18	95.20	87.15	87.40	90.18	92.50	
9	Cakupan Keluarga Anggota BKR Yang Ber-KB	Persentase Keluarga BKR Yang Ber-KB	93.59	93.80	95.05	95.50	93.59	93.80	95.05	95.50	
10	TFR (Total Fertility Rate) / Angka Kelahiran Total	Nilai TFR	2.47	2.43	2.41	2.35	2.45	2.43	2.41	2.35	
11	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 (Age Specific Fertility Rate / ASFR 15-19)	Angka ASFR 15-19	20.00	50.00	40.00	30.00	9.00	50.00	40.00	30.00	
12	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / mCPR)	Persentase Peserta KB Aktif Per Pasangan Usia Subur (PUS)	74.40	77.10	78.00	80.00	76.40	77.10	78.00	80.00	
13	Persentase Kebutuhan Ber-KB Yang Tidak Tepenuhi (unmet need)	Persentase Kebutuhan Ber-KB Yang Tidak Tepenuhi (unmet need)	17.50	16.00	15.50	13.50	16.10	16.00	15.50	13.50	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Secara garis besar Pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu: Pertama berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain: jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk. Kedua, berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan. Ketiga adalah mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antara perkotaan dan perdesaan. Keempat adalah data dan informasi penduduk dan kelima adalah penyerasian kebijakan kependudukan. Pembangunan Kependudukan dan KB di Indonesia harus benar - benar dapat memanfaatkan jendela peluang demografi untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penguatan Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang program kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) pelaksanaannya masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan, yaitu :

- 1) Masih lemahnya komitmen dan dukungan Stekholder terhadap Program KKBPK yaitu terkait kelembagaan, kebijakan perencanaan program dan penganggaran.
- 2) Masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga yaitu sekitar 2,6.
- 3) Pelaksanaan Advokasi dan KIE yang belum efektif di tandai dengan kurangnya pengetahuan tentang KB dan Alat kontrasepsi dari Pasangan Usia Subur (PUS) terutama dalam pemilihan dan pemakaian alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP).
- 4) Masih terjadi kesenjangan dalam memperoleh informasi Informasi tentang Program KKBPK baik dari Kabupaten ke kecamatan maupun dari kecamatan ke desa.
- 5) Pelaksanaan Advokasi dan KIE mengenai KB yang belum resfonsif gender, terbukti kesertan KB pria masih rendah dan perlu ditingkatkan.
- 6) Muatan dan pesan dalam advokasi dan KIE belum dipahami secara optimal. Peran bidang dan tentang lapangan KB dalam Konseling KB belum Optimal.

Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB antara lain, adalah :

- a) Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi yaitu sekitar 10,6%.
- b) Tingkat putus pakai penggunaan Alat kontrasepsi (drop out) sebesar 12,12% dari tahun 2015
- c). Penggunaan alat dan obat metode kontrasepsi jangka pendek (non MKJP) cukup tinggi sebesar 85,97% sementara MKJP masih rendah 14,03% di tahun 2015.
- d) Rendahnya kesetaraan KB Pria sebesar 3,88 sampai dengan tahun 2015
- e) Kualitas Pelayanan KB (Supply Side) belum sesuai standar yaitu berkaitan dengan ketersediaan dan persebaran fasilitas kesehatan/klinik pelayanan KB, ketersediaan dan persebaran tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan KB, kemampuan Bidan dan Dokter dalam memberikan penjelasan tentang pilihan metode KB secara komperhensif termasuk mengenai efek samping Alokon dan penangannya serta komplikasi dan kegagalan
- f) Jaminan pelayanan KB belum seluruhnya terpetakan pada pasilitasi pelayanan KB terutama dalam rangka pelaksanaan system jaman social Nasional.

Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga sangat penting dalam upaya menurunkan kematian ibu melahirkan. Permasalahan kesehatan reproduksi remaja antara lain :

- a). Angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun masih tinggi.

- b). Masih banyaknya perkawinan usia muda(Usia ideal pernikahan menurut kesehatan reproduksi adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi pria).
- c). Terdapat kesejngan dalam pembinaan, pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR).
- d). Tingginya perilaku sex pra nikah di sebagian kalangan remaja berakibat pada kehamilan yang tidak di inginkan masih tinggi.
- e). Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah .
- f). Cakupan dan peran Pusat Informasi dan konseling Remaja Mahasiswa (PIK R/M) belum optimal.

Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang di tandai dengan peningkatan fungsi keluarga.

Dalam rangka pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga melalui pembinaan, kelestarian, kesertaan ber KB masih di hadapkan pada beberapa permasalahan antara lain :

- a). Masih tingginya keluarga miskin(Keluarga pra sejahtera /KPS).
- b). Pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhann anak yang baik dan Tumbang anak masih rendah.
- c). Partisipasi, pemahaman, dan kesadaran keluarga/orang tua yang memiliki remaja dalam kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga masih rendah.
- d). Kualitas hidup Lanjut Usia(lansia) dan kemampuan keluarga dalam merawat lansia masih belum optimal.
- e). Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- f). Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung pembinaan kelestarian kesetaraan berKB, dan di samping itu kelompok kegiatan (POKTAN) terdiri dari Bina Keluarga Bailta(BKB), Bina Keluarga Remaja(BKR), Bina Keluarga Lansia(BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan dan Keluarga Sejahtera(UPPKS) belum optimal dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya berKB/Pelestarian Peserta KB Aktif(PA).
- g). Terbatasnya materi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga(KKBPK) dalam kelompok kegiatan serta terbatasnya jumlah dan kualitas kader / tenaga kelompok kegiatan.

Penguatan landasan hukum dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana(KKB).

Penguatan landasan hukum dan penyerasian kebijakan pembangunan bidang KKB memiliki beberapa permasalahan antara lain :

- a). Landasan hukum dan penyerasian kebijakan pembangunan bidang KKB belum memadai, yaitu masih terdapat beberapa peraturan pemerintah dari UU Nomor 52 Tahun 2009 yang belum disusun dan ditetapkan, dan masih banyak kebijakan pembangunan sector lain yang tidak sinergi dengan pembangunan bidang KKB.
- b). Komitmen dan dukungan pemerintah pusat dadan daerah terhadap kebijakan pembanguna bidang KKB masih rendah yaitu Kurangnya pemahaman pemerintah pusat dan daerah tentang program KKBPK dan belum semua kebijakan perencanaan program dan penganggaran yang terkait dnegan bidang KKB di masukkan dalam perencanaan daerah serta peraturan perundangan yang belum sinergis dalam penguatan pelembagaan pembangunan bidang KKB.
- c). Koordinasi pembangunan bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana(KKB) dengan program pembangunan lainnya masih lemah antara lain, koordinasi dengan program

bantuan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan(PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Jampersal, Kotaku (Kota Tanpa Kumuh/PNPM) serta penanganan kebijakan pembangunan bidang KKB selama ini masih bersifat parsial.

Penguatan data dan informasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdapat beberapa sumber data pembangunan kependudukan KB dan KS diantaranya administrasi kependudukan dan mencatat registrasi pendukung dan registrasi Vital program KB dan KS. Namun data sektoral yang di peroleh melalui Kader IMP, PLKB/PKB dan UPTB belum dapat digunakan secara optimal dalam pengawasan , pemantauan, pengendalian dan evaluasi, di karenakan system pengolahan data masih kurang.

Untuk menaggulangi permasalahan dan isu-isu diatas maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menetapkan salah satunya adalah melalui :

- ✚ 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- ✚ 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- ✚ 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- ✚ 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- ✚ 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- ✚ 5. Program Keluarga Berencana
- ✚ 6. Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Produksi
- ✚ 7. Program Pengendalian Penduduk
- ✚ 8. Program Advokasi, Pergerakan dan Informasi
- ✚ 9. Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPd dan Renstra PD pada tahun 2021

Sejalan dengan pokok-pokok kebijakan dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Brencana perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA). *Dokumen Renstra SKPD Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 – 2021* adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD. Renstra SKPD dijabarkan setiap tahun kedalam Rencana Kerja SKPD sebagai pedoman dalam penyusunan RKA SKPD yang mengacu pada kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA- PPAS).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas ada perubahan dalam sasaran strategis dimana pada awal perencanaan Renstra DPPKB terdapat dua (2) sasaran, setelah dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 sudah disahkan sehingga ada perubahan sasaran strategis pada Renstra DPPKB yang memiliki **Tujuan Starategis, yaitu : “Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan, Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan Meningkatkan pengentasan kemiskinan”** yang dapat dilihat dibawah ini :

Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab	Catatan Penting
1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai Mutu	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Hasil Penilaian Tim	Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan	DPPKB Kutai Kartanegara	Tujuan dan Sasaran RPJMD
2	Meningkatnya kesertaan KB	Rasio KB aktif per Pasangan Usia Subur (PUS)	%	Meningkatkan jumlah akseptor KB di masyarakat	DPPKB, DISDUKC APIL, Kesehatan, Rumah Sakit dan BPS	Jumlah Peserta KB aktif dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dikalikan 100	DPPKB Kutai Kartanegara	Permendagri No. 86 Tahun 2017
3	Meningkatnya aksesibilitas keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1 dalam program Keluarga Berencana	Persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1 yang ikut ber-KB	%	Mendukung sasaran RPJMD dalam pengentasan kemiskinan	DPPKB, DISDUKC APIL, Kesehatan, Rumah Sakit dan BPS	Jumlah peserta KB keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1 dibagi dengan jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1 dikalikan 100	DPPKB Kutai Kartanegara	Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sehingga dapat kita lihat perinciannya dari **Tabel 3**, tentang Rancangan awal RKPD tahun 2021 :

TABEL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021

KABUPATEN KUTAI KARTANEGRAA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2		3	4	5	7	2		3	4	5	7	
1	Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Tenggarong	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100.00	2,581,605,000.00	Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Tenggarong	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100.00	2,581,605,000.00	
1.1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tenggarong	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	rekening	48	165,000,000.00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tenggarong	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	rekening	48	165,000,000.00	
1.2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	kendaraan	151	45,000,000.00	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	kendaraan	151	45,000,000.00	
1.3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tenggarong	Jumlah unit peralatan kerja diperbaiki /dipelihara	unit	55	50,000,000.00	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tenggarong	Jumlah unit peralatan kerja diperbaiki /dipelihara	unit	55	50,000,000.00	
1.4	Penyediaan alat tulis kantor	Tenggarong	Jumlah alat tulis kantor	paket	1	100,000,000.00	Penyediaan alat tulis kantor	Tenggarong	Jumlah alat tulis kantor	paket	1	100,000,000.00	
1.5	Penyediaan bahan logistik kantor	Tenggarong	Jumlah jenis bahan logistik kantor	paket	1	30,000,000.00	Penyediaan bahan logistik kantor	Tenggarong	Jumlah jenis bahan logistik kantor	paket	1	30,000,000.00	
1.6	Penyediaan makanan dan minuman	Tenggarong	Jumlah makanan dan minumam	porsi	1200	40,000,000.00	Penyediaan makanan dan minuman	Tenggarong	Jumlah makanan dan minumam	porsi	1200	40,000,000.00	
1.7	Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran	Tenggarong	Jumlah jasa administrasi Teknis Perkantoran	orang	61	1,096,605,000.00	Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran	Tenggarong	Jumlah jasa administrasi Teknis Perkantoran	orang	61	1,096,605,000.00	
1.8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tenggarong	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	paket	3	75,000,000.00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tenggarong	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	paket	3	75,000,000.00	
1.9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Tenggarong	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi	orang/kali	190	450,000,000.00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Tenggarong	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi	orang/kali	190	450,000,000.00	
1.10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tenggarong	Jumlah Bahan Bacaan dan Jumlah Peraturan Perundang-Undangan	eksemplar	4464	30,000,000.00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tenggarong	Jumlah Bahan Bacaan dan Jumlah Peraturan Perundang-Undangan	eksemplar	4464	30,000,000.00	
1.11	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah jenis arsip	jenis	3	250,000,000.00	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah jenis arsip	jenis	3	250,000,000.00	
1.12	Fasilitasi memperingati hari-hari besar tertentu (pameran)	Tenggarong	Jumlah kegiatan hari besar/nasional dan pameran	even	4	250,000,000.00	Fasilitasi memperingati hari-hari besar tertentu (pameran)	Tenggarong	Jumlah kegiatan hari besar/nasional dan pameran	even	4	250,000,000.00	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tenggarong	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	Persen	90.00	1,800,000,000.00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tenggarong	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	Persen	90.00	1,800,000,000.00	
2.1	Pengadaan perlengkapan gedung	Tenggarong	Jumlah pengadaan perlengkapan	unit	30	250,000,000.00	Pengadaan perlengkapan gedung	Tenggarong	Jumlah pengadaan perlengkapan	unit	30	250,000,000.00	
2.2.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tenggarong	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	unit	36	200,000,000.00	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tenggarong	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	unit	36	200,000,000.00	
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tenggarong	Jumlah kendaraan dinas / operasional kantor yang dipelihara	unit	158	200,000,000.00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tenggarong	Jumlah kendaraan dinas / operasional kantor yang dipelihara	unit	158	200,000,000.00	
2.4	Pembangunan Prasarana Gedung Kantor	Tenggarong	Jumlah bangunan	bangunan	1	200,000,000.00	Pembangunan Prasarana Gedung Kantor	Tenggarong	Jumlah bangunan	bangunan	1	200,000,000.00	
2.5	Pengadaan Mobil Jabatan	Tenggarong	Jumlah kendaraan	unit	1	450,000,000.00	Pengadaan Mobil Jabatan	Tenggarong	Jumlah kendaraan	unit	1	450,000,000.00	
2.6	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tenggarong	Jumlah kendaraan	unit	1	500,000,000.00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tenggarong	Jumlah kendaraan	unit	1	500,000,000.00	
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tenggarong	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	0.00	550,000,000.00	Program peningkatan disiplin aparatur	Tenggarong	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	0.00	550,000,000.00	
3.1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tenggarong	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	stell	145	150,000,000.00	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tenggarong	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	stell	145	150,000,000.00	
3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Tenggarong	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	stell	145	150,000,000.00	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Tenggarong	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	stell	145	150,000,000.00	
3.3	Pengadaan pakaian olah raga	Tenggarong	Jumlah pakaian olah raga	stell	145	250,000,000.00	Pengadaan pakaian olah raga	Tenggarong	Jumlah pakaian olah raga	stell	145	250,000,000.00	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tenggarong	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	Tingkat Nilai	89.00	450,000,000.00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tenggarong	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	Tingkat Nilai	89.00	450,000,000.00	
4.1	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah DPPKB	Tenggarong	Jumlah fasilitasi	orang	15	100,000,000.00	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah DPPKB	Tenggarong	Jumlah fasilitasi	orang	15	100,000,000.00	
4.2	Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia ASN Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah peserta	orang	20	200,000,000.00	Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia ASN Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah peserta	orang	20	200,000,000.00	

4.3	Rapat Koordinasi Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah peserta	peserta	60	150,000,000.00	Rapat Koordinasi Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah peserta	peserta	60	150,000,000.00	
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tenggarong	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	Persen	1) 100,00 2) 100,00 3) 100,00	575,000,000.00	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tenggarong	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	Persen	1) 100,00 2) 100,00 3) 100,00	575,000,000.00	
5.1	Penyusunan Dokumen Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Tenggarong	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Kinerja dan Keuangan	dokumen	90	250,000,000.00	Penyusunan Dokumen Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Tenggarong	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Kinerja dan Keuangan	dokumen	90	250,000,000.00	
5.2	Penyusunan Dokumen Renstra	Tenggarong	Tersedianya dokumen Renstra	dokumen	1	75,000,000.00	Penyusunan Dokumen Renstra	Tenggarong	Tersedianya dokumen Renstra	dokumen	1	75,000,000.00	
5.3	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Kutai Kartanegara	Tersedianya dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat	dokumen	1	75,000,000.00	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Kutai Kartanegara	Tersedianya dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat	dokumen	1	75,000,000.00	
5.4	Penyusunan Buku Profil DPPKB	Kutai Kartanegara	Tersedianya Buku Profil DPPKB	eksemplar	250	100,000,000.00	Penyusunan Buku Profil DPPKB	Kutai Kartanegara	Tersedianya Buku Profil DPPKB	eksemplar	250	100,000,000.00	
5.5	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	dokumen	1	75,000,000.00	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	dokumen	1	75,000,000.00	
6	Program Keluarga Berencana	Kutai Kartanegara	Angka pemakaian kontrasepsi CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	Persen	78.00	1,275,000,000.00	Program Keluarga Berencana	Kutai Kartanegara	Angka pemakaian kontrasepsi CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	Persen	78.00	1,275,000,000.00	
6.1	Pembinaan Petugas Pengelola Program KB di Fasilitas Kesehatan dan Jejaring	Kutai Kartanegara	Jumlah Petugas Faskes yang dibina	peserta	100	100,000,000.00	Pembinaan Petugas Pengelola Program KB di Fasilitas Kesehatan dan Jejaring	Kutai Kartanegara	Jumlah Petugas Faskes yang dibina	peserta	100	100,000,000.00	
6.2	Pengadaan sarana penunjang pelayanan KB	Tenggarong	Jumlah ALOKON	jenis	5	150,000,000.00	Pengadaan sarana penunjang pelayanan KB	Tenggarong	Jumlah ALOKON	jenis	5	150,000,000.00	
6.3	Monitoring dan Evaluasi Distribusi ALOKON	Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Monitoring	faskes	18	175,000,000.00	Monitoring dan Evaluasi Distribusi ALOKON	Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Monitoring	faskes	18	175,000,000.00	
6.4	Fasilitasi Tim KB Keliling (TKBK) Kecamatan ke Desa	Kutai Kartanegara	Jumlah Akseptor yang dilayani	orang	1600	250,000,000.00	Fasilitasi Tim KB Keliling (TKBK) Kecamatan ke Desa	Kutai Kartanegara	Jumlah Akseptor yang dilayani	orang	1600	250,000,000.00	
6.5	Pelatihan CTU MKJP bagi tenaga Medis	Samarinda	Jumlah bidan yang dilatih	orang	30	300,000,000.00	Pelatihan CTU MKJP bagi tenaga Medis	Samarinda	Jumlah bidan yang dilatih	orang	30	300,000,000.00	
			Cakupan Pelayanan KB Baru	Persen	15.67				Cakupan Pelayanan KB Baru	Persen	15.67		
6.6	Pelayanan KB	Kutai Kartanegara		orang	600	300,000,000.00	Pelayanan KB	Kutai Kartanegara		orang	600	300,000,000.00	
7	Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi	Tenggarong	Cakupan PUS yang isterinya dibawah 20 tahun	Persen	54.87	200,000,000.00	Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi	Tenggarong	Cakupan PUS yang isterinya dibawah 20 tahun	Persen	54.87	200,000,000.00	
7.1	Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR)	Tenggarong	Jumlah kelompok remaja yang mendapatkan advokasi dan KIE	kelompok	20	100,000,000.00	Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR)	Tenggarong	Jumlah kelompok remaja yang mendapatkan advokasi dan KIE	kelompok	20	100,000,000.00	
7.2	Perlindungan Kesehatan Reproduksi	Tenggarong	Jumlah peserta layanan kesehatan reproduksi	orang	40	100,000,000.00	Perlindungan Kesehatan Reproduksi	Tenggarong	Jumlah peserta layanan kesehatan reproduksi	orang	40	100,000,000.00	
8	Program Pengendalian Penduduk	Kutai Kartanegara	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	2.16	1,600,000,000.00	Program Pengendalian Penduduk	Kutai Kartanegara	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	2.16	1,600,000,000.00	
8.1	Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	Kutai Kartanegara	Jumlah KK	KK	12000	250,000,000.00	Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	Kutai Kartanegara	Jumlah KK	KK	12000	250,000,000.00	
8.2	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara	Tenggarong	Dokumen Grand Design	dokumen	1	200,000,000.00	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara	Tenggarong	Dokumen Grand Design	dokumen	1	200,000,000.00	
8.3	Desiminasi Grand Design dan Pengendalian Kependudukan	Tenggarong	Peserta Desiminasi	orang	100	100,000,000.00	Desiminasi Grand Design dan Pengendalian Kependudukan	Tenggarong	Peserta Desiminasi	orang	100	100,000,000.00	
8.4	Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU)	Tenggarong	Jumlah Forum	forum	1	100,000,000.00	Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU)	Tenggarong	Jumlah Forum	forum	1	100,000,000.00	

			Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah PPKB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	100.00				Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah PPKB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	100.00		
8.5	Pengembangan kapasitas sumber daya manusia PKB/PLKB/Kader	Kutai Kartanegara	Jumlah PKB/PLKB/Kader	peserta	900	550,000,000.00	Pengembangan kapasitas sumber daya manusia PKB/PLKB/Kader	Kutai Kartanegara	Jumlah PKB/PLKB/Kader	peserta	900	550,000,000.00	
8.6	Pelatihan pencatatan dan pelaporan KB di faskes	Tenggarong	Jumlah Peserta	peserta	50	150,000,000.00	Pelatihan pencatatan dan pelaporan KB di faskes	Tenggarong	Jumlah Peserta	peserta	50	150,000,000.00	
8.7	Alokasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK)	Kutai Kartanegara	Terpenuhinya operasional Kegiatan Keluarga Berencana	kecamatan	18	-	Alokasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK)	Kutai Kartanegara	Terpenuhinya operasional Kegiatan Keluarga Berencana	kecamatan	18	-	
8.8	Peningkatan sarana dan prasarana Keluarga Berencana (DAK)	Kutai Kartanegara	Terpenuhinya dukungan sarana penyuluhan KB	kecamatan	2	-	Peningkatan sarana dan prasarana Keluarga Berencana (DAK)	Kutai Kartanegara	Terpenuhinya dukungan sarana penyuluhan KB	kecamatan	2	-	
8.9	Penyusunan Dokumen Pendukung Alokasi DAK Fisik	Tenggarong	Tersedianya dokumen pendukung sarana fisik KB	dokumen	10	250,000,000.00	Penyusunan Dokumen Pendukung Alokasi DAK Fisik	Tenggarong	Tersedianya dokumen pendukung sarana fisik KB	dokumen	10	250,000,000.00	
9	Program Advokasi, Pergerakan, dan Informasi	Tenggarong	Jumlah Kegiatan Advokasi, Pergerakan dan Informasi	Kegiatan	3	900,000,000.00	Program Advokasi, Pergerakan, dan Informasi	Tenggarong	Jumlah Kegiatan Advokasi, Pergerakan dan Informasi	Kegiatan	3	900,000,000.00	
9.1	Fasilitasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Tenggarong	Jumlah media dan sarana produksi KIE	jenis	3	450,000,000.00	Fasilitasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Tenggarong	Jumlah media dan sarana produksi KIE	jenis	3	450,000,000.00	
9.2	Database Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Tenggarong	Jumlah database Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	database	1	250,000,000.00	Database Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Tenggarong	Jumlah database Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	database	1	250,000,000.00	
		Kutai Kartanegara	Persentase Kampung KB Bernilai Baik	Persen	100.00			Kutai Kartanegara	Persentase Kampung KB Bernilai Baik	Persen	100.00		
9.3	Fasilitasi pengelolaan kampung KB	Kutai Kartanegara	Jumlah Kampung KB	kampung	37	200,000,000.00	Fasilitasi pengelolaan kampung KB	Kutai Kartanegara	Jumlah Kampung KB	kampung	37	200,000,000.00	
10	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Kutai Kartanegara	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yg Ber-KB Mandiri	Persen	40.67	1,410,000,000.00	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Kutai Kartanegara	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yg Ber-KB Mandiri	Persen	40.67	1,410,000,000.00	
10.1	Peningkatan Ketrampilan Kader dan Anggota Kelompok UPPKS	Kutai Kartanegara	Jumlah Kader dan anggota UPPKS	orang	70	275,000,000.00	Peningkatan Ketrampilan Kader dan Anggota Kelompok UPPKS	Kutai Kartanegara	Jumlah Kader dan anggota UPPKS	orang	70	275,000,000.00	
10.2	Pengembangan Jaringan dan Media Promosi Produk Kelompok UPPKS	Kutai Kartanegara	Jumlah UPPKS	kelompok	20	150,000,000.00	Pengembangan Jaringan dan Media Promosi Produk Kelompok UPPKS	Kutai Kartanegara	Jumlah UPPKS	kelompok	20	150,000,000.00	
			Cakupan Keluarga Anggota BKB dan BKL yang ber-KB	Persen	90.18				Cakupan Keluarga Anggota BKB dan BKL yang ber-KB	Persen	90.18		
10.3	Pengembangan Kelompok BKB	Kutai Kartanegara	Jumlah Orang dalam Kelompok BKB	kelompok	200	210,000,000.00	Pengembangan Kelompok BKB	Kutai Kartanegara	Jumlah Orang dalam Kelompok BKB	kelompok	200	210,000,000.00	
10.4	Pengembangan Kelompok BKL	Kutai Kartanegara	Jumlah Orang dalam Kelompok BKL	kelompok	100	100,000,000.00	Pengembangan Kelompok BKL	Kutai Kartanegara	Jumlah Orang dalam Kelompok BKL	kelompok	100	100,000,000.00	
			Cakupan Keluarga Anggota BKR yang ber-KB	Persen	95.05				Cakupan Keluarga Anggota BKR yang ber-KB	Persen	95.05		
10.5	Pengembangan kelompok BKR	Kutai Kartanegara	Jumlah Orang dalam Kelompok BKR	kelompok	140	175,000,000.00	Pengembangan kelompok BKR	Kutai Kartanegara	Jumlah Orang dalam Kelompok BKR	kelompok	140	175,000,000.00	
10.6	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Kutai Kartanegara	Jumlah PPKS	unit	18	150,000,000.00	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Kutai Kartanegara	Jumlah PPKS	unit	18	150,000,000.00	
10.7	Pengembangan ketahanan keluarga bagi generasi muda	Kutai Kartanegara	Jumlah sarana kegiatan GenRe	jenis	5	350,000,000.00	Pengembangan ketahanan keluarga bagi generasi muda	Kutai Kartanegara	Jumlah sarana kegiatan GenRe	jenis	5	350,000,000.00	
Total Anggaran						11,341,605,000.00	Total Anggaran						11,341,605,000.00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Renja 2021 ini berdasarkan usulan masyarakat khusus penentuan perumusan program dan kegiatan Kelompok Kerja berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, Musrenbang SKPD tingkat Provinsi dan musrenbang kabupaten/kota serta mengakomodir usulan dari Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Beberapa isu strategis dan permasalahan Pengendalian Kuantitas Penduduk sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021, yang harus mendapat perhatian khusus adalah Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera atau program KKBPK, maka diperlukan penguatan program dan kegiatan melalui penajaman pada tujuan dan sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang harus bermuara pada Isu Srategis Kutai Kartanegara yaitu Peningkatan keberdayaan msyarakat dalam pembangunan bidang kesehatan dengan sasaran meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan hingga tingkat desa dan terciptanya budaya sehat.

Pada Renja 2021 ini terdapat beberapa usulan kegiatan dari kecamatan yang masuk dalam bidang kesehatan khususnya yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana pada matrik dibawah ini :



USULAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN TAHUN 2021

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Program / Kegiatan	Usulan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
I	Pengendalian Penduduk						
1.1.	Alokasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK)	1.1.1 Usulan UPT KB.PPAPA Pelatihan Terpadu 14 RT x 5 orang = 70 Orang Kel. Dondang	Kel. Dondang Kec, Muara Jawa	Peserta penyuluhan dan pelatihan	70 Orang	10,500,000.00	Jenis kegiatan penyuluhan dan pelatihan kader BKB
		1.1.2 Usulan UPT. PPKBD + set (Kader KB) 14 RT + 1 PPKB = 15 Kel. Dondang	Kel. Dondang Kec. Muara Jawa	Peserta penyuluhan dan pelatihan	15 Orang	10,500,000.00	Jenis kegiatan penyuluhan dan pelatihan RR PPKBD dan Sub PPPKBD
		1.1.3. Penyuluhan KB Kel. Muara Kembang	Kel, Muara Kembang Kec. Muara Jawa	Peserta penyuluhan dan pelatihan	40 Orang	15,000,000.00	Kegiatan penyuluhan Tribina di Kampung KB Muara Kembang
1.2.	Peningkatan sarana dan prasarana Keluarga Berencana (DAK)	1.2.1. Pengadaan alat penunjang/peraga (BKB H.I, BKL KIT, KIE KIT) kelompok kampung KB KELUARGA KEHAM SEJAHTERA	Desa Lebak Mantan Kec. Muara Wis	BKB H.I, BKL Kit, KIE Kit	1 Paket	50,000,000.00	Pengadaan BKB Kit dan KIE Kit
		1.2.2. Pengadaan alat penunjang/peraga (BKB H.I, BKL KIT, KIE KIT) kelompok kampung KB KELUARGA KEHAM SEJAHTERA	Desa Lebak Cilong Kec. Muara Wis	BKB H.I, BKL Kit, KIE Kit	1 Paket	50,000,000.00	Pengadaan BKB Kit dan KIE Kit

No	Program / Kegiatan	Usulan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
II	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga							
2.1.	Peningkatan Ketrampilan Kader dan anggota Kelompok UPPKS	2.1.1. Penambahan Petugas lapangan DP2KB di Kec. Kembang Janggut	Kec. Kembang Janggut	Petugas Lapangan KB	5	Orang	-	Untuk Petugas Lapangan KB tidak bisa diakomodir karena adanya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 dan Surat Edaran Bupati terkait tidak diperkenankan lagi pengangkatan THL
2.2.	Peningkatan Ketrampilan Kader dan Anggota Kelompok UPPKS	2.2.1. Pengadaan peralatan penunjang kelompok UPPKS (alat Press pengemasan, pengering kerupuk dan vacum udara kemasan)	Desa Lebak Mantan Kec. Muara Wis	Alat Press Pengemasan, Pengering Kerupuk dan Vacum Udara Kemasan	1	Paket	10,000,000.00	Usulan awal pada kegiatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan dialihkan pada kegiatan Peningkatan Keterampilan Kader dan Anggota Kelompok UPPKS
2.3.	Peningkatan Ketrampilan Kader dan Anggota Kelompok UPPKS	2.3.1 Pengadaan peralatan penunjang kelompok UPPKS (alat Press pengemasan, pengering kerupuk dan vacum udara kemasan)	Desa Muara Wis Kec. Muara Wis	Alat Press Pengemasan, Pengering Kerupuk dan Vacum Udara Kemasan			-	Usulan tidak disetujui karena keterbatasan anggaran

No	Program / Kegiatan	Usulan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2.4.	Peningkatan Keterampilan Kader dan Anggota Kelompok UPPKS	2.4.1. Pengadaan peralatan penunjang kelompok UPPKS (alat Press pengemasan, pengering kerupuk dan vacuum udara kemasan)	Desa Muara Enggelam Kec. Muara Wis	Alat Press Pengemasan, Pengering Kerupuk dan Vacuum Udara Kemasan	1 Paket	10,000,000.00	Usulan awal pada kegiatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan dialihkan pada kegiatan Peningkatan Keterampilan Kader dan Anggota Kelompok UPPKS
					Jumlah	156,000,000.00	

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Lokasi	Target Kinerja		Pagu Dana		Catatan Penting
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi	Persen	Tenggarong	100.00	100.00	2,581,605,000.00	2,666,605,000.00	-
1.1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	rekening	Tenggarong	48	48	165,000,000.00	190,000,000.00	
1.2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	kendaraan	Tenggarong	151	151	45,000,000.00	60,000,000.00	
1.3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah unit peralatan kerja diperbaiki /dipelihara	unit	Tenggarong	55	65	50,000,000.00	75,000,000.00	
1.4	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	paket	Tenggarong	1	1	100,000,000.00	125,000,000.00	
1.5	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor	paket	Tenggarong	1	1	30,000,000.00	40,000,000.00	
1.6	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minumam	porsi	Tenggarong	1200	1800	40,000,000.00	60,000,000.00	
1.7	Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis	Jumlah jasa administrasi Teknis Perkantoran	orang	Tenggarong	61	61	1,096,605,000.00	1,096,605,000.00	
1.8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	paket	Tenggarong	3	3	75,000,000.00	80,000,000.00	
1.9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi	orang/kali	Tenggarong	190	210	450,000,000.00	450,000,000.00	
1.10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Jumlah Peraturan Perundang-Undangan	eksemplar	Tenggarong	4464	4464	30,000,000.00	40,000,000.00	
1.11	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah jenis arsip	jenis	Tenggarong	3	3	250,000,000.00	150,000,000.00	
1.12	Fasilitasi memperingati hari-hari besar tertentu (pameran)	Jumlah kegiatan hari besar/nasional dan pameran	even	Tenggarong	4	4	250,000,000.00	300,000,000.00	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	Persen	Tenggarong	90.00	95.00	1,800,000,000.00	750,000,000.00	-
2.1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung	unit	Tenggarong	30	35	250,000,000.00	300,000,000.00	
2.2.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	unit	Tenggarong	36	40	200,000,000.00	250,000,000.00	
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional kantor yang dipelihara	unit	Tenggarong	158	158	200,000,000.00	200,000,000.00	
2.4	Pembangunan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah bangunan	bangunan	Tenggarong	1	-	200,000,000.00	-	
2.5	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah kendaraan	unit	Tenggarong	1	-	450,000,000.00	-	
2.6	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan	unit	Tenggarong	1	-	500,000,000.00	-	
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	Tenggarong	0.00	0.00	550,000,000.00	675,000,000.00	-

3.1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	stell	Tenggarong	145	-	150,000,000.00	175,000,000.00	
3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta	Jumlah pakaian dinas beserta	stell	Tenggarong	145	-	150,000,000.00	200,000,000.00	
3.3	Pengadaan pakaian olah raga	Jumlah pakaian olah raga	stell	Tenggarong	145	145	250,000,000.00	300,000,000.00	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	Tingkat Nilai	Tenggarong	89.00	90.00	450,000,000.00	475,000,000.00	-
4.1	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah DPPKB	Jumlah fasilitasi	orang	Tenggarong	15	15	100,000,000.00	100,000,000.00	
4.2	Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia ASN Perangkat Daerah	Jumlah peserta	orang	Tenggarong	20	20	200,000,000.00	200,000,000.00	
4.3	Rapat Koordinasi Perangkat Daerah	Jumlah peserta	peserta	Tenggarong	60	60	150,000,000.00	175,000,000.00	
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset;	Persen	Tenggarong	1) 100,00 2) 100,00 3) 100,00	1) 100,00 2) 100,00 3) 100,00	575,000,000.00	650,000,000.00	-
5.1	Penyusunan Dokumen Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Kinerja dan	dokumen	Tenggarong	90	90	250,000,000.00	300,000,000.00	
5.2	Penyusunan Dokumen Renstra	Tersedianya dokumen Renstra	dokumen	Tenggarong	1	1	75,000,000.00	75,000,000.00	
5.3	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat	dokumen	Kutai Kartanegara	1	1	75,000,000.00	75,000,000.00	
5.4	Penyusunan Buku Profil DPPKB	Tersedianya Buku Profil DPPKB	eksemplar	Kutai Kartanegara	250	250	100,000,000.00	125,000,000.00	
5.5	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen	dokumen	Kutai Kartanegara	1	1	75,000,000.00	75,000,000.00	
6	Program Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	Persen	Kutai Kartanegara	78.00	78.20	1,275,000,000.00	1,400,000,000.00	-
6.1	Pembinaan Petugas Pengelola Program KB di Fasilitas Kesehatan dan Jejaring	Jumlah Petugas Faskes yang dibina	peserta	Kutai Kartanegara	100	100	100,000,000.00	125,000,000.00	
6.2	Pengadaan sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah ALOKON	jenis	Tenggarong	5	5	150,000,000.00	150,000,000.00	
6.3	Monitoring dan Evaluasi Distribusi ALOKON	Jumah Kegiatan Monitoring	faskes	Kutai Kartanegara	18	18	175,000,000.00	175,000,000.00	
6.4	Fasilitasi Tim KB Keliling (TKBK) Kecamatan ke Desa	Jumlah Akseptor yang dilayani	orang	Kutai Kartanegara	1600	1600	250,000,000.00	250,000,000.00	
6.5	Pelatihan CTU MKJP bagi tenaga Medis	Jumlah bidan yang dilatih	orang	Samarinda	30	30	300,000,000.00	300,000,000.00	

		Cakupan Pelayanan KB Baru	Persen		15.67	20.67			
6.6	Pelayanan KB		orang	Kutai Kartanegara	600	600	300,000,000.00	400,000,000.00	
7	Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi	Cakupan PUS yang isterinya dibawah 20 tahun	Persen	Tenggarong	54.87	50.87	200,000,000.00	250,000,000.00	-
7.1	Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR)	Jumlah kelompok remaja yang mendapatkan advokasi dan KIE	kelompok	Tenggarong	20	20	100,000,000.00	125,000,000.00	
7.2	Perlindungan Kesehatan Reproduksi	Jumlah peserta layanan kesehatan	orang	Tenggarong	40	40	100,000,000.00	125,000,000.00	
8	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	Kutai Kartanegara	2.16	2.10	1,600,000,000.00	1,450,000,000.00	-
8.1	Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	Jumlah KK	KK	Kutai Kartanegara	12000	12000	250,000,000.00	250,000,000.00	
8.2	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara	Dokumen Grand Design	dokumen	Tenggarong	1	-	200,000,000.00	-	
8.3	Desiminasi Grand Design dan Pengendalian Kependudukan	Peserta Desiminasi	orang	Tenggarong	100	-	100,000,000.00	-	
8.4	Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU)	Jumlah Forum	forum	Tenggarong	1	1	100,000,000.00	125,000,000.00	
		Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah PPKB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen		100.00	100.00			-
8.5	Pengembangan kapasitas sumber daya manusia PKB/PLKB/Kader	Jumlah PKB/PLKB/Kader	peserta	Kutai Kartanegara	900	900	550,000,000.00	600,000,000.00	
8.6	Pelatihan pencatatan dan pelaporan KB di faskes	Jumlah Peserta	peserta	Tenggarong	50	50	150,000,000.00	175,000,000.00	
8.7	Alokasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK)	Terpenuhinya operasional Kegiatan Keluarga Berencana	kecamatan	Kutai Kartanegara	18	18	-	-	
8.8	Peningkatan sarana dan prasarana Keluarga Berencana (DAK)	Terpenuhinya dukungan sarana penyuluhan KB	kecamatan	Kutai Kartanegara	2	4	-	-	
8.9	Penyusunan Dokumen Pendukung Alokasi DAK Fisik	Tersedianya dokumen pendukung sarana fisik KB	dokumen	Tenggarong	10	10	250,000,000.00	300,000,000.00	

9	Program Advokasi, Pergerakan, dan Informasi	Jumlah Kegiatan Advokasi, Pergerakan dan Informasi	Kegiatan	Tenggarong	3	5	900,000,000.00	950,000,000.00	-
9.1	Fasilitasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE	Jumlah media dan sarana produksi KIE	jenis	Tenggarong	3	3	450,000,000.00	450,000,000.00	
9.2	Database Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah database Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	database	Tenggarong	1	1	250,000,000.00	200,000,000.00	
		Persentase Kampung KB Bernilai Baik	Persen	Kutai Kartanegara	100.00	100.00			-
9.3	Fasilitasi pengelolaan kampung KB	Jumlah Kampung KB	kampung	Kutai Kartanegara	37	38	200,000,000.00	300,000,000.00	
10	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yg Ber-KB Mandiri	Persen	Kutai Kartanegara	40.67	42.67	1,410,000,000.00	1,950,000,000.00	-
10.1	Peningkatan Ketrampilan Kader dan Anggota Kelompok UPPKS	Jumlah Kader dan anggota UPPKS	orang	Kutai Kartanegara	70	70	275,000,000.00	400,000,000.00	
10.2	Pengembangan Jaringan dan Media Promosi Produk Kelompok UPPKS	Jumlah UPPKS	kelompok	Kutai Kartanegara	20	20	150,000,000.00	200,000,000.00	
		Cakupan Keluarga Anggota BKB dan BKL yang ber-KB	Persen		90.18	90.25			-
10.3	Pengembangan Kelompok BKB	Jumlah Orang dalam Kelompok BKB	kelompok	Kutai Kartanegara	200	200	210,000,000.00	300,000,000.00	
10.4	Pengembangan Kelompok BKL	Jumlah Orang dalam Kelompok BKL	kelompok	Kutai Kartanegara	100	100	100,000,000.00	200,000,000.00	
		Cakupan Keluarga Anggota BKR yang ber-KB	Persen		95.05	95.50			-
10.5	Pengembangan kelompok BKR	Jumlah Orang dalam Kelompok BKR	kelompok	Kutai	140	140	175,000,000.00	200,000,000.00	
10.6	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Jumlah PPKS	unit	Kutai Kartanegara	18	18	150,000,000.00	200,000,000.00	
10.7	Pengembangan ketahanan keluarga bagi generasi muda	Jumlah sarana kegiatan GenRe	jenis	Kutai Kartanegara	5	5	350,000,000.00	450,000,000.00	
		Total Anggaran					11,341,605,000.00	11,216,605,000.00	

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu diselenggarakan pembangunan yang berkelanjutan, terencana dan terarah. Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera merupakan bagian integral dan terpenting dalam pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

Sebagaimana diketahui bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 68 tahun 2016 Tentang kedudukan Susunan Organisasi Fungsi serta Tata Kerja perangkat Daerah sebagai instansi yang diberi kewenangan dan tanggungjawab dalam bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dituntut mempunyai Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja (RENJA) disusun berdasarkan program yang terencana, terarah serta terukur yang diharapkan dapat memenuhi kehendak aspirasi serta partisipasi masyarakat sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016 s/d 2021 disusun berdasarkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Mengacu pada Permendagri No.86 tahun 2017, maka ada rencana aksi untuk mereview Dokumen Renstra Dinas sehingga akan terjadi perubahan terhadap indikator sasaran Renstra. Hal ini penting mengingat Renstra merupakan acuan implementatif bagi seluruh pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini memuat visi, misi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta perumusan strategi yang mencakup perumusan kebijaksanaan, program dan kegiatan Renstra SKPD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja SKPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

3.2 . Tujuan dan Sasaran Renja-PD

Maksud dari dibuatnya Rencana kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Kutai Kartanegara Periode 2016-2021. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2021.

Tujuan dan *Sasaran* dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kesertaan keluarga berencana
Meningkatkan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya aksesibilitas keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 dalam program keluarga berencana

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

a. Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara berusaha memberikan pelayanan dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati. Dalam upaya pemberian layanan pada masyarakat masih terdapat permasalahan yang disebabkan adanya factor penghambat. Namun demikian terdapat factor pendorong yang berkontribusi positif dalam perbaikan layanan. Permasalahan, factor penghambat dan pendorong dapat dilihat pada table berikut:

Rumusan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara

SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Visi : “ Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan “				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1 : Memantapkan Reformasi Birokrasi Untuk Rakyat;			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Belum maksimalnya pelayanan administrasi perkantoran	Terbatasnya fasilitas / peralatan kerja dalam memberikan pelayanan baik internal maupun eksternal	Tugas dan fungsi DPPKB dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yaitu meningkatkan kualitas kesehatan dan menurunkan angka kemiskinan

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terbatasnya sarana dan prasarana kerja aparatur	Keberadaan Gedung Kantor yang kurang representatif dengan kebutuhan organisasi (DPPKB) Terbatasnya sarana dan prasarana terutama Kendaraan Dinas Jabatan / Operasional Lapangan yang belum tersedia	Tugas dan fungsi DPPKB dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yaitu meningkatkan kualitas kesehatan dan menurunkan angka kemiskinan
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Masih kurangnya kepatuhan aparatur terhadap peraturan yang berlaku	Belum berubahnya pola pikir	Adanya pemberian tunjangan tambahan penghasilan
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Masih rendahnya kompetensi aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing	Keterbatasan jumlah tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB Kompetensi ASN yang masih rendah	Peningkatan kualitas kinerja ASN dalam memaksimalkan pelayanan
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Seringnya keterlambatan dalam penyampaian laporan	Masih belum maksimalnya monitoring dan evaluasi serta pengendalian kegiatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penerapan SAKIP yang baik

Visi :

“ Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan “

No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan	Faktor
----	------------------	------------------------	--------

	Bupati dan Wakil Bupati terpilih	SKPD	Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 2 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkompeten			
7	Program Keluarga Berencana	Masih rendahnya angka pengguna kontrasepsi MKJP	<p>Keterbatasan jumlah tenaga penyuluh KB / Petugas Lapangan KB Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk ber-KB terutama dengan menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</p> <p>Pemahaman (Pola Pikir) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 tentang Banyak Anak Banyak Rezeki</p>	<p>Indikator Persentase Peserta KB Aktif per Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi indikator pembangunan berkelanjutan (SDG's)</p> <p>Tugas dan fungsi DPPKB dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yaitu meningkatkan kualitas kesehatan dan menurunkan angka kemiskinan</p>
8	Program Pengendalian Penduduk	Belum maksimalnya capaian target yang telah ditetapkan	<p>Keterbatasan jumlah tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB Masih rendahnya Kompetensi sebagian Penyuluh dan Petugas Lapangan KB</p> <p>Keterbatasan kemampuan Kader PPKBD dan Sub PPKBD dalam membantu pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana</p>	<p>Kehadiran Bonus Demografi</p> <p>Wacana Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi bagian dari IKN</p> <p>Tugas dan fungsi DPPKB dalam urusan Pengendalian Penduduk dan</p>

			dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Keluarga Berencana dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yaitu meningkatkan kualitas kesehatan dan menurunkan angka kemiskinan
9	Program Advokasi, Pergerakan dan Informasi	Masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Keterbatasan sarana prasarana penunjang fasilitasi kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi baik secara online maupun offline Kurangnya apresiasi terhadap para juara lomba : KB Lestari, Orang Tua Hebat, Kelompok BKB, BKR, BKL, PIK-Remaja, dll terkait Program KKBPK	Program Nawa Cita Presiden RI terkait dengan Kampung KB Perkembangan teknologi informasi dalam penyampaian komunikasi informasi dan edukasi
10	Ketahanan dan pemberdayaan keluarga	Peningkatan ketahanan keluarga secara umum dan khusus focus pada Keluarga Pra sejahtera dan Keluarga sejahtera 1	Keterbatasan jumlah tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB Keterbatasan sarana prasasana penunjang kegiatan PIK-Remaja, BKB, BKR dan BKL	Program pemerintah dalam rangka menurunkan angka kemiskinan melalui penguatan fungsi ekonomi keluarga Menyiapkan generasi yang berkualitas melalui BKB, BKR, BKL, PIK-Remaja dengan penurunan angka gizi buruk dan stunting

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi, maka kegiatan pada Dinas PPKB Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun sebanyak **63 Kegiatan dan 10 Program**. Dengan perincian dapat dilihat dari **Tabel** Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Berdasarkan Sumber Pendanaan tahun 2021:

KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF BERDASARKAN SUMBER PENDANAAN						
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Lokasi	Pagu Dana	
					Tahun 2021	Sumber Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	Tenggarong	2,581,605,000.00	APBD
1.1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	rekening	Tenggarong	165,000,000.00	APBD
1.2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	kendaraan	Tenggarong	45,000,000.00	APBD
1.3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah unit peralatan kerja diperbaiki /dipelihara	unit	Tenggarong	50,000,000.00	APBD
1.4	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	paket	Tenggarong	100,000,000.00	APBD
1.5	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor	paket	Tenggarong	30,000,000.00	APBD
1.6	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minumam	porsi	Tenggarong	40,000,000.00	APBD
1.7	Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran	Jumlah jasa administrasi Teknis Perkantoran	orang	Tenggarong	1,096,605,000.00	APBD
1.8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	paket	Tenggarong	75,000,000.00	APBD
1.9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi	orang/kali	Tenggarong	450,000,000.00	APBD
1.10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Jumlah Peraturan Perundang-Undangan	eksemplar	Tenggarong	30,000,000.00	APBD
1.11	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah jenis arsip	jenis	Tenggarong	250,000,000.00	APBD
1.12	Fasilitasi memperingati hari-hari besar tertentu (pameran)	Jumlah kegiatan hari besar/nasional dan pameran	even	Tenggarong	250,000,000.00	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	Persen	Tenggarong	1,800,000,000.00	APBD
2.1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung	unit	Tenggarong	250,000,000.00	APBD
2.2.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	unit	Tenggarong	200,000,000.00	APBD
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional kantor yang dipelihara	unit	Tenggarong	200,000,000.00	APBD
2.4	Pembangunan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah bangunan	bangunan	Tenggarong	200,000,000.00	APBD
2.5	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah kendaraan	unit	Tenggarong	450,000,000.00	APBD
2.6	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan	unit	Tenggarong	500,000,000.00	APBD

3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	Tenggarong	550,000,000.00	APBD
3.1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	stell	Tenggarong	150,000,000.00	APBD
3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	stell	Tenggarong	150,000,000.00	APBD
3.3	Pengadaan pakaian olah raga	Jumlah pakaian olah raga	stell	Tenggarong	250,000,000.00	APBD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	Tingkat Nilai	Tenggarong	450,000,000.00	APBD
4.1	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah DPPKB	Jumlah fasilitasi	orang	Tenggarong	100,000,000.00	APBD
4.2	Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia ASN Perangkat Daerah	Jumlah peserta	orang	Tenggarong	200,000,000.00	APBD
4.3	Rapat Koordinasi Perangkat Daerah	Jumlah peserta	peserta	Tenggarong	150,000,000.00	APBD
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	Persen	Tenggarong	575,000,000.00	APBD
5.1	Penyusunan Dokumen Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Kinerja dan Keuangan	dokumen	Tenggarong	250,000,000.00	APBD
5.2	Penyusunan Dokumen Renstra	Tersedianya dokumen Renstra	dokumen	Tenggarong	75,000,000.00	APBD
5.3	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat	dokumen	Kutai Kartanegara	75,000,000.00	APBD
5.4	Penyusunan Buku Profil DPPKB	Tersedianya Buku Profil DPPKB	eksemplar	Kutai Kartanegara	100,000,000.00	APBD
5.5	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen	dokumen	Kutai Kartanegara	75,000,000.00	APBD
6	Program Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	Persen	Kutai Kartanegara	1,275,000,000.00	APBD
6.1	Pembinaan Petugas Pengelola Program KB di Fasilitas Kesehatan dan Jejaring	Jumlah Petugas Faskes yang dibina	peserta	Kutai Kartanegara	100,000,000.00	APBD
6.2	Pengadaan sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah ALOKON	jenis	Tenggarong	150,000,000.00	APBD
6.3	Monitoring dan Evaluasi Distribusi ALOKON	Jumlah Kegiatan Monitoring	faskes	Kutai Kartanegara	175,000,000.00	APBD

6.4	Fasilitasi Tim KB Keliling (TKBK) Kecamatan ke Desa	Jumlah Akseptor yang dilayani	orang	Kutai Kartanegara	250,000,000.00	APBD
6.5	Pelatihan CTU MKJP bagi tenaga Medis	Jumlah bidan yang dilatih	orang	Samarinda	300,000,000.00	APBD
		Cakupan Pelayanan KB Baru	Persen			APBD
6.6	Pelayanan KB		orang	Kutai Kartanegara	300,000,000.00	APBD
7	Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi	Cakupan PUS yang isterinya dibawah 20 tahun	Persen	Tenggarong	200,000,000.00	APBD
7.1	Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR)	Jumlah kelompok remaja yang mendapatkan advokasi dan KIE	kelompok	Tenggarong	100,000,000.00	APBD
7.2	Perlindungan Kesehatan Reproduksi	Jumlah peserta layanan kesehatan reproduksi	orang	Tenggarong	100,000,000.00	APBD
8	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	Kutai Kartanegara	1,736,000,000.00	APBD
8.1	Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	Jumlah KK	KK	Kutai Kartanegara	250,000,000.00	APBD
8.2	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara	Dokumen Grand Design	dokumen	Tenggarong	200,000,000.00	APBD
8.3	Desiminasi Grand Design dan Pengendalian Kependudukan	Peserta Desiminasi	orang	Tenggarong	100,000,000.00	APBD
8.4	Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU)	Jumlah Forum	forum	Tenggarong	100,000,000.00	APBD
		Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah PPKB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen			APBD
8.5	Pengembangan kapasitas sumber daya manusia PKB/PLKB/Kader	Jumlah PKB/PLKB/Kader	peserta	Kutai Kartanegara	550,000,000.00	APBD
8.6	Pelatihan pencatatan dan pelaporan KB di faskes	Jumlah Peserta	peserta	Tenggarong	150,000,000.00	APBD
8.7	Alokasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK)	Terpenuhinya operasional Kegiatan Keluarga Berencana	kecamatan	Kutai Kartanegara	-	D A K

8.7.1	Usulan UPT KB.PPAPA Pelatihan Terpadu 14 RT x 5 orang = 70 Orang Kel. Dondang	Jumlah peserta pelatihan	peserta	Dondang	10,500,000.00	D A K
8.7.2	Usulan UPT. PPKBD + set (Kader KB) 14 RT + 1 PPKB = 15 Kel. Dondang	Jumlah perlengkapan	set	Dondang	10,500,000.00	D A K
8.7.3	Penyuluhan KB Kelurahan Muara Kembang	Jumlah peserta penyuluhan	peserta	Muara Kembang	15,000,000.00	D A K
8.8	Peningkatan sarana dan prasarana Keluarga Berencana (DAK)	Terpenuhinya dukungan sarana penyuluhan KB	kecamatan	Kutai Kartanegara	-	D A K
8.8.1	Pengadaan alat penunjang/peraga (BKB H.I, BKL KIT, KIE KIT) kelompok kampung KB KELUARGA KEHAM SEJAHTERA	Tersedianya BKB, BKL, KIE Kit	paket	Lebak Mantan	50,000,000.00	D A K
8.8.2	Pengadaan alat penunjang/peraga (BKB H.I, BKL KIT, KIE KIT) kelompok kampung KB KELUARGA BAHAGIA	Tersedianya BKB, BKL, KIE Kit	paket	Lebak Cilong	50,000,000.00	D A K
8.9	Penyusunan Dokumen Pendukung Alokasi DAK Fisik	Tersedianya dokumen pendukung sarana fisik KB	dokumen	Tenggarong	250,000,000.00	APBD
9	Program Advokasi, Pergerakan, dan Informasi	Jumlah Kegiatan Advokasi, Pergerakan dan Informasi	Kegiatan	Tenggarong	900,000,000.00	APBD
9.1	Fasilitasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Jumlah media dan sarana produksi KIE	jenis	Tenggarong	450,000,000.00	APBD
9.2	Database Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah database Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	database	Tenggarong	250,000,000.00	APBD
		Persentase Kampung KB Bernilai Baik	Persen	Kutai Kartanegara		APBD
9.3	Fasilitasi pengelolaan kampung KB	Jumlah Kampung KB	kampung	Kutai Kartanegara	200,000,000.00	APBD
10	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yg Ber-KB Mandiri	Persen	Kutai Kartanegara	1,430,000,000.00	APBD
10.1	Peningkatan Ketrampilan Kader dan Anggota Kelompok UPPKS	Jumlah Kader dan anggota UPPKS	orang	Kutai Kartanegara	275,000,000.00	APBD
10.1.1	Pengadaan peralatan penunjang kelompok UPPKS (alat frees pengemasan, pengering kerupuk dan vacum udara kemasan)	Jumlah peralatan	1	Lebak Mantan	10,000,000.00	APBD

10.1.2	Pengadaan peralatan penunjang kelompok UPPKS (alat frees pengemasan, pengering kerupuk dan vacum udara kemasan)	Jumlah peralatan	1	Muara Enggelam	10,000,000.00	APBD
10.2	Pengembangan Jaringan dan Media Promosi Produk Kelompok UPPKS	Jumlah UPPKS	kelompok	Kutai Kartanegara	150,000,000.00	APBD
		Cakupan Keluarga Anggota BKB dan BKL yang ber-KB	Persen			APBD
10.3	Pengembangan Kelompok BKB	Jumlah Orang dalam Kelompok BKB	kelompok	Kutai Kartanegara	210,000,000.00	APBD
10.4	Pengembangan Kelompok BKL	Jumlah Orang dalam Kelompok BKL	kelompok	Kutai Kartanegara	100,000,000.00	APBD
		Cakupan Keluarga Anggota BKR yang ber-KB	Persen			APBD
10.5	Pengembangan kelompok BKR	Jumlah Orang dalam Kelompok BKR	kelompok	Kutai	175,000,000.00	APBD
10.6	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Jumlah PPKS	unit	Kutai Kartanegara	150,000,000.00	APBD
10.7	Pengembangan ketahanan keluarga bagi generasi muda	Jumlah sarana kegiatan GenRe	jenis	Kutai Kartanegara	350,000,000.00	APBD
Total Anggaran					11,497,605,000.00	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 merupakan salah satu rencana pencapaian kinerja tahun Ke-5 (Lima) urusan wajib bukan pelayanan dasar dengan Indikator Kinerja Utama adalah :

Indikator Kineja Utama (IKU)
Nilai Akuntabilitas Kinerja DPPKB
Persentase Keluarga Berencana aktif per-Pasangan Usia Subur (PUS)
Persentase Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Pra-Sejahtera I yang ikut Ber-Keluarga Berencana

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021. Proses penyusunan RKPD Tahun 2021 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah.

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian :

1. Masih rendahnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (UNMET NEED) dan rendahnya pencapaian KB baru MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang).
2. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan dalam menunjang kegiatan baik untuk pelayanan internal maupun pelayanan eksternal terkait dengan tugas dan fungsi OPD.
3. Jumlah tenaga PKB/PLKB yang jauh dari ideal, sekitar 5 Desa dibina oleh satu orang PKB/PLKB sedangkan yang idealnya 1 atau 2 Desa dibina oleh 1 orang PKB/PLKB.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi RENJA merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai salah satu SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan isi RENJA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

c. Rencana tindak lanjut

Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun kedepan merupakan penjabaran dari prioritas tujuan. Dalam upaya mencapai tujuan unit kerja perlu ditetapkan program tahunan, yaitu sebagaimana tersebut yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021.

Untuk mewujudkan tujuan pencapaian tingkat kinerja diatas tidak dapat dilaksanakan melalui suatu kegiatan yang bersamaan, tetapi harus melalui tahapan yang berkesinambungan. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut yng menjadi sarana prioritas adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Rencana Kerja (RENJA) OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Kutai Kartanegara, disusun berdasarkan program dan kegiatan pada bidang-bidang teknis dan usulan dari hasil musrenbang kabupaten. Penyempurnaan metrik RENJA OPD bertujuan untuk mewujudkan alat ukur efektivitas pencapaian sasaran pembangunan. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan rencana kerja tahunan adalah target setting dan pencapaian indikator kinerja.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 disampaikan, sebagai acuan dan dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan serta sebagai alat ukur efektivitas pencapaian sasaran pembangunan, efisiensi belanja dan akuntabilitas kinerja Pemerintah.

Tenggarong, 18 Maret 2020

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kutai Kartanegara

Kepala,

Drs. Adinur, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650210 199003 1 016



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Jenderal Sudirman No. 02 RT. 04 Telp.0541 Fax 0541
TENGGARONG

**K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NOMOR : 188.43/DP2KB/PROG-KEU/2/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 118);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 68;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**
- KESATU :** Mengesahkan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021;
 - b. Menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 berdasarkan Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara tentang Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2021;
 - c. Menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah;
 - d. Menyusun Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021;
 - e. Menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 untuk ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kutai Kartanegara; dan
 - f. Menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 14 Pebruari 2020

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara

Kepala,

Drs. Adinur, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650210 199003 1 016

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Masing-masing Tim Penyusun di – Tempat
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 188.43/DP2KB/PROG-KEU/2/2020
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2020
TENTANG : PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Drs. Adinur, M.AP	Kepala	Penanggung Jawab
2	Dra. Mastukhah, M.Si	Sekretaris	K e t u a
3	Zein Wahyudi Pasa, SP	Kasub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	Sekretaris
4	Dra. Hj. Zaifah Nurbani	Kabid Keluarga Berencana	Anggota
5	Ir. Hj. Yovia Mousvita	Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	Anggota
6	Yuliansyah, S.Sos., M.Si	Kabid Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
7	Aji Egi Wahyuni. R, S.Sos., M.Si	Kasi Distribusi Alokasi	Anggota
8	Mohammad Ali Qomaruzzaman, A.Md.Kep	Kasi Jaminan Pelayanan KB	Anggota
9	Denny Ibrahim, S.Sos	Kasi Pembinaan Kesertaan KB	Anggota
10	Haspian Nur, SE., MM	Kasi Advokasi dan Penggerakan	Anggota
11	Tuti Agustiana, SE	Kasi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader	Anggota
12	Haidir, SE., MM	Kasi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	Anggota
13	Hj. Tuti Asnawati, S.Sos., MM	Kasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Anggota
14	Hj. Hasanah, SE., M.Si	Kasi BKB, BKA, BKL	Anggota
15	Dra. Hj. Sumarni, MM	Kasi Bina Ketahanan Remaja	Anggota
16	H. Andri Afiat, SE., M.Si	Kasub Bag Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Anggota
17	Dina Elvina, SE	Pelaksana	Anggota
18	Ibnu Alfarisi, SE	Pelaksana	Anggota
19	Nasaruddin. N	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 14 Februari 2020

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara

Kepala,

Drs. Adinur, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650210 199003 1 016